

## Kinerja Pemerintahan Desa (Studi terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae)

Muhammad Akbar<sup>1</sup>, Ariana<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, *Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar, Sulawesi Selatan*, 90245  
E-mail Korespondensi : [muhammadakbarabbal@gmail.com](mailto:muhammadakbarabbal@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research discusses the performance of the village government with an emphasis on road infrastructure development in Turu Cinnae Village, Lamuru District, Bone Regency. The aim of this research is to understand the political dynamics of the performance of improving road infrastructure development in Turu Cinnae Village and identify factors that hinder the development of this infrastructure. This research adopts a qualitative descriptive method by collecting primary data through observation, interviews and documentation, as well as secondary data from literature reviews such as books, journals, annual reports and related websites. The results of the study show that the performance of village heads in road infrastructure development is still lacking, optimal, as evidenced by the many complaints from the local community. Disincentives include the lack of attention from the village bureaucracy, the poor health of village leaders, and the reluctance of the community to donate land for road construction or rehabilitation. On the other hand, community enthusiasm to support the implementation of infrastructure development is an important supporting factor.*

**Keywords:** *Performance, Village Government, Infrastructure Development*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kinerja pemerintah desa dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika politik terhadap kinerja perbaikan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur tersebut. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari tinjauan pustaka seperti buku, jurnal, laporan tahunan, dan situs web terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan masih kurang optimal, terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat setempat. Disinsentifnya antara lain kurangnya perhatian birokrasi desa, buruknya kesehatan pemimpin desa, dan keengganan masyarakat menyumbangkan lahan untuk pembangunan atau rehabilitasi jalan. Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi faktor pendukung yang penting.

**Kata Kunci:** Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur

## 1. PENDAHULUAN

Ketika Anda mendengar kata "Birokrasi", Anda mengira itu adalah proses pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lain yang kompleks dan berliku-liku, dan akhirnya memakan biaya yang mahal. Berdasarkan definisi birokrasi, istilah ini merujuk pada organisasi yang didirikan secara resmi dengan tujuan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkan pemerintahan, termasuk sistem kelembagaan, alat dan metode untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemanfaatan sosial.. (Rahman, 2007).

Perkumpulan yang meliputi lembaga, alat, sistem, metode, dan lain-lain ini merupakan kelompok unik dalam masyarakat yang mempunyai gagasan dan nilai yang sama sedikit demi sedikit dari itu, mereka juga mempunyai kekuatan sendiri, yang membuat mereka mempunyai tanggung jawab khusus (Rahman, 1998).

Masalah utama dalam birokrasi adalah pemerintah sering kali membuat Penilaian publik kurang akurat dan kurang tepat waktu. Selain itu, birokrasi seringkali dipandang tidak efisien (buruk), seperti halnya dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN) di mana belanja untuk birokrasi lebih besar daripada belanja untuk pembangunan. Situasi ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera menjadi prioritas dalam penataan penyelenggaraan kenegaraan (Alamsyah, 2013).

Pembangunan struktur mutu akan membawa substansi bagi masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita membuat struktur yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Kita sering melihat jalan rusak, bangunan terbelah, pulau rusak, dan akses jalan berisiko tersumbat. Ini adalah gambaran buruk yang tidak boleh terus terjadi karena akan mempengaruhi penilaian masyarakat luar negeri terhadap kemampuan kita dalam mengelola struktur.

Kata "birokrasi" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "office" yang berarti meja dan "cratin" yang berarti wewenang. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan berada di tangan orang-orang yang bekerja di belakang meja. Menurut Blau dan Page (1956), birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dengan menggabungkan upaya banyak individu. Blau dan Page menjelaskan bahwa tujuan birokrasi adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meningkatkan efisiensi, meskipun prosesnya dapat menghasilkan inefisiensi. Birokrasi lama bungkam, mempertanyakan praktik terbaik bangsa dalam memenuhi nilai-nilai bangsa demi kesejahteraan rakyat. Faktanya, masyarakat semakin sulit mendapatkan hak-hak pemerintah, apalagi jika harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan kewarganegaraan, seperti surat keterangan tempat tinggal, perkawinan, perceraian, kelahiran anak, pendidikan, dan kesehatan. Sedikit demi sedikit dari itu, pengurusan izin, baik izin usaha maupun izin perapian, juga tidak memuat kewajiban membayar sejumlah ongkos angkut.

Menurut Payaman Simanjuntak, kinerja adalah kedudukan tercapainya hasil dari Implementasi fungsi khusus. Kinerja bisnis mengacu pada kemampuan untuk

mencapai hasil dalam kinerja aktivitas suatu bisnis atau asosiasi, termasuk aktivitas setiap orang yang ada dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi tersebut (Waani, 2014).

Aparat desa diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ekspektasi yang ada. Untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa, penulis menggunakan berbagai metode pengukuran kinerja menurut Lenvinne dalam (Ratminto & Septi, 2005) sebagai berikut:

1. Responsivitas menggambarkan kemampuan penyedia layanan untuk mengidentifikasi keinginan masyarakat, merencanakan menyusun agenda, menetapkan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program yang selaras dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, tingkat responsivitas adalah indikator seberapa baik sebuah perusahaan dapat merespons dan memenuhi harapan, keinginan, aspirasi, dan permintaan pelanggan.
2. Responsibilitas mencerminkan sejauh mana penyediaan layanan publik dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengukur tingkat keterbukaan mencakup memastikan bahwa prosedur, tata cara, pengelolaan pemerintahan, dan aspek lain yang terkait dengan layanan publik disampaikan secara transparan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami, baik melalui permintaan maupun secara langsung.
3. Akuntabilitas merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar-standar yang ada dalam masyarakat dan diharapkan oleh semua pihak yang terlibat, seperti nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kriteria ini mencerminkan perhatian atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah atau penyedia layanan dalam mengatasi masalah-masalah terbaru yang sedang berkembang di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, jika perangkat desa bekerja dengan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, pembangunan desa dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Karena itu, dalam implementasinya perlu mengadopsi strategi yang mengakui masyarakat bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai aktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Faktor-faktor yang berdampak pada prestasi. Di samping beberapa penunjuk prestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula beberapa elemen yang berdampak pada jumlah dan mutu kinerja individu atau organisasi. Menurut Syamsuddin, terdapat tiga elemen yang memiliki potensi untuk memengaruhi prestasi

pribadi, yaitu kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas individu. (Torang, 2012)

Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan mereka yang memiliki kekuasaan tersebut. (Budiardjo, 2003) Menurut Dalam definisi ini, kekuasaan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa ada bidang yang tidak terpengaruh. Konsep kekuasaan meluas dari bidang politik ke bidang sosial dan budaya. Kekuasaan merupakan salah satu aspek politik yang paling sering disalahpahami dan diperdebatkan. Banyak masyarakat awam yang memang beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan. Dalam kebijaksanaan politik, terdapat berbagai kesamaan yang hampir berkaitan dengan kekuasaan, seperti (1) pengaruh, yang menunjukkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mau berpindah posisi dan bertindak bebas; (2) memaksa, yang menunjukkan penggunaan non-kekuasaan. - kekuatan fisik untuk memaksa pihak lain bertindak sesuai keinginan penguasa, seperti menimbulkan ketakutan atau membatasi pemenuhan kebutuhan alam (seperti makanan dan minuman); (3) persuasi, kekuatan videlicet yang melibatkan kemampuan untuk bergerak orang lain melalui argumentasi logis, rasional sehingga mereka melakukan kompromi; (4) manipulasi, videlicet penggunaan pengaruh dimana orang yang disuruh tidak menyadari bahwa tindakannya mengikuti keinginan pemegang kekuasaan; (5) koersif, videlicet the pengoperasian kekuasaan atau upaya paksaan oleh individu atau kelompok (sering kali melibatkan tindakan fisik atau kekerasan) untuk memaksa pihak bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, bahkan jika hal itu bertentangan dengan keinginannya; (6) wewenang, atau menurut Max Weber otoritas hukum formal adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang berdasarkan legitimasi yang melekat pada dirinya.

Secara etimologis, kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang untuk mempengaruhi dan mengubah orang lain melakukan tindakan yang bertujuan mencapai suatu hal bersama, sehingga individu menjadi pusat dari struktur dan proses kelompok. Dari segi bahasa, banyak penggambaran kepemimpinan yang dikemukakan. Operasi sering kali memandang kepemimpinan dari sudut pandang mereka sendiri dan menilai aspek-aspek yang mereka anggap penting. Sebagai contoh, Edwin A. Locke mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses yang melibatkan membujuk orang lain untuk mengikuti suatu jalur demi mencapai tujuan Bersama (Intan, 2013).

Menurut (Nasution, 2020) Gaya Kepemimpinan mengacu pada cara seorang pemimpin berinteraksi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan inilah yang menjadi dasar untuk membedakan atau mengklasifikasikan tipe-tipe kepemimpinan. Ada tiga pola pengantar pendekatan kepemimpinan yaitu :

1. Pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan pelaksanaan tugas dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.

2. Pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada hubungan kolaboratif.
3. Pendekatan kepemimpinan yang menitikberatkan pada hasil yang dicapai untuk mencapai cita-cita organisasi, dimana pemimpin memberikan perhatian penuh dan berkeinginan kuat agar setiap anggota mencapai kinerja maksimal. (Ajang, 2015)

Peran manajer sangat penting dalam organisasi karena mereka memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan tuntutan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dan pengetahuan lain, baik yang terarah maupun strategis, bertanggung jawab, mampu mempengaruhi dan memimpin orang lain, mampu mengemukakan pendapat, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Anda perlu memiliki ide-ide yang cerdas dan mudah untuk berkomunikasi. Kemudian, lindungi bawahan Anda, berikan motivasi, dan lakukan pendekatan tertentu.

Birokrasi yang buruk jelas berdampak pada pelayanan, yang dapat menimbulkan biaya keuntungan yang tinggi serta merusak moral dan kecerdasan aparatur itu sendiri. Birokrasi di Indonesia semakin memburuk karena prinsip-prinsip peraturan seringkali disalahgunakan dan dimanfaatkan secara curang. Dampak buruknya birokrasi saat ini antara lain permasalahan yang penuh warna, jelasnya. Skala yang kaku menyebabkan birokrasi kehilangan tindakan dan lambat dalam merespons, terutama jika hal ini tidak didorong oleh para tetua. Peraturan yang tidak jelas dan stasiun-stasiun yang mencurigakan menghambat tindakan masyarakat. Kualitas pelayanan publik belum efektif karena belum adanya batasan waktu dan biaya yang jelas. Birokrasi terlalu gemuk karena warisan politik yang monoton, Koneksi hierarkis yang kaku dan ketidakmampuan untuk membedakan tingkat urgensi masing-masing masalah (Alamsyah, 2013).

Sebaliknya, struktur yang dibentuk dapat meningkatkan rasa otoritas dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan dan pemeliharaannya setelah desain selesai. Pembangunan struktur desa harus mempunyai tujuan yang tepat secara bertahap agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan dengan cara yang efektif dan efisien (Suryadi, 2005)

Minimnya pembangunan struktur di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Perbaikan jalan seringkali menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat, dengan banyak warga menilai kinerja pemerintah desa dalam hal ini menangani pekerjaan konstruksi belum maksimal, padahal sejauh ini pemerintah desa sudah melakukan tindakan sebanyak tiga kali.

Kondisi jalan di desa ini relatif memprihatinkan, apalagi saat musim hujan, sebagian jalan terendam banjir dan banyak yang berlubang besar, padahal ini merupakan jalur utama keluar masuk kampung masyarakat. Karena pemerintah desa merasa tidak mampu mengatasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki penyebab dan kendala yang menghambat perbaikan jalan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan eksplorasi

dengan judul “Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Turu Cinnae dengan menggunakan teori ukuran kinerja menurut Lenvinne dalam (Ratminto & Septi, 2005) yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintahan desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam perbaikan pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut.

## 2. METODE

Metode penelitian adalah rencana dan prosedur yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi dasar hingga teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang spesifik (Andrew et al., 2019) tanpa dimanipulasi atau diatur oleh eksperimen atau tes (Rashid et al., 2019).

Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diyakini oleh seseorang atau kelompok terkait dengan isu sosial atau kemanusiaan (Harfiani et al., 2020; Wilbur et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada pengamatan fenomena dan mengkaji secara mendalam inti makna dari fenomena tersebut. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada penggunaan kata dan kalimat yang efektif dalam analisis. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih fokus pada proses dan makna dari hasil yang diperoleh (Aspers & Corte, 2019). Penelitian kualitatif lebih memusatkan perhatian pada unsur-unsur manusia, objek, dan institusi, serta interaksi dan hubungan di antara mereka, dalam rangka memahami peristiwa, perilaku, atau fenomena tertentu (Grodal et al., 2021). Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang akan menerapkan ukuran kinerja dalam perbaikan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae. Unit analisis merupakan entitas tertentu yang dijadikan bahan penelitian, yang berarti satuan Analisis berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan-tahapan berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Keabsahan data diuji melalui Triangulasi Sumber, Teknik, dan Waktu, mengingat jumlah informan penelitian yang cukup banyak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Turu Cinnae

Upaya kepala desa bisa dipahami sebagai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau seberapa baik kinerja kepala desa dalam mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu fokus utama pembahasan dalam kajian mendalam ini adalah kinerja pemerintah di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Saat ini, gambaran politik yang sebagian besar bersifat normatif telah digantikan oleh penggambaran lain yang tidak terlalu menekankan upaya untuk menciptakan masyarakat yang kedepannya lebih baik lagi, beberapa aspek penting meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan, alokasi program, dan sebagainya. Namun, pemahaman politik sebagai cara untuk mencapai masyarakat yang lebih baik juga merupakan hal yang penting. masih tetap ada. Seperti yang dikatakan Peter Merkl “Politik, dalam bentuknya yang bergaya, adalah upaya untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan adil (politik, pada hakikatnya adalah perburuan mulia untuk ketertiban dan keadilan).” Meskipun gambaran ini mungkin tidak jelas, namun hal ini tetap menjadi latar belakang dan akhir dari upaya politik. Penting untuk dipahami bahwa pemahaman tentang apa yang baik dan adil ditentukan oleh nilai-nilai, wasiat, dan lingkungan pada setiap periode.. (Budiardjo, 2003).

Secara umum, politik dapat diartikan sebagai cara menetapkan peraturan yang dapat diterima oleh warga negara yang bertanggung jawab untuk memungkinkan hidup berdampingan secara harmonis. Kekuasaan begitu penting dalam kajian politik sehingga politik tanpa kekuasaan ibarat agama tanpa keterlibatan moral. Hal ini, serta kepemimpinan kepala desa, sangat penting untuk membangun komunitas yang kaya dan mandiri dengan Ikatan emosional yang kuat adalah aspek penting dari kepemimpinan kepala desa, yang merupakan elemen kunci dalam setiap posisi di perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Turu Cinnae, pembangunan struktur jalan desa sudah menunjukkan kemajuan, namun pandangan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan pendapat masyarakat Desa Turu Cinnae. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Turu Cinnae:

“Pembangunan Infrastruktur di Desa Turu Cinnae sudah ada perubahan” (Wawancara pada tanggal 05 Februari 2024)

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kondisi dilapangan di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, berikut adalah beberapa pandangan dari masyarakat setempat, seorang tokoh pemuda Desa Turu Cinnae menyatakan:

“Mengenai Penyempurnaan saya merasa bahwa jalan desa kurang mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Sejauh ini kami belum melihat bukti apa pun.” (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Salah satu warga Desa Turu Cinnae mengungkapkan:

“Kinerja Desa Turu Cinnae sekarang ini masih harus dilakukan peningkatan karena masih banyak pembangunan infrastruktur tidak terealisasi dan terlaksana di beberapa titik.

Mengingat Kepala Desa sudah menjabat, maka pengembangan struktur masih perlu ditingkatkan." (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Seorang tokoh pemuda sekaligus ketua Karang Taruna Desa Turu Cinnae mengatakan:

"Tetap saja, tidak ada yang terlihat oleh mata, jika dilihat dari konstruksinya. Meskipun anggarannya besar, hasilnya belum terlihat. Mungkin kita perlu menunggu waktu atau tahun mendatang untuk melihat perubahannya pada Tahun 2025 sudah bisa terlihat, namun saat ini belum terlihat, dan jalan tani masih perlu diperbaiki." (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

**Tabel 1.** Pagu Anggaran Dana Desa Turu Cinnae

No	Tahun	Pagu Anggaran Dana Desa
1.	Tahun 2023	Rp 884.529.000
2.	Tahun 2024	Rp 955.939.000

Sumber : Data Desa Turu Cinnae Tahun 2024

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi cara berpikir dan bertindak orang lain, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Biasanya, pengaruh bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan sikap seseorang dan sering kali bersaing dengan faktor-faktor lainnya. Bagi mereka yang memahami, ada aspek lain yang perlu ditindaklanjuti.

Pengaruh mungkin kurang efektif dibandingkan kekuasaan, namun elemen otak yang menyentuh hati dapat membuatnya bekerja. Pengabdian masyarakat dalam pengembangan struktur desa masih minim. Buktinya menunjukkan bahwa pembangunan struktur desa memerlukan perhatian khusus yang menunjukkan masih lemahnya kinerja birokrasi dalam memperbaiki atau mengembangkan struktur. Sesuai penuturan salah satu Masyarakat Desa Turu Cinnae:

"Persoalan utama Saat ini, fokus utama adalah pembangunan infrastruktur, mengingat selama ini belum ada perbaikan infrastruktur yang dilakukan. (Wawancara pada tanggal 08 Februari 2024)

Berdasarkan informasi tersebut, kinerja birokrasi desa masih memerlukan peningkatan karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut para peneliti, layanan desa juga harus digunakan sebagaimana mestinya. Selama ini kantor kelurahan hanya digunakan untuk pertemuan dan acara konvensional lainnya. Ketika pengkondisian layanan masyarakat berlangsung, staf yang berwenang seringkali tidak tersedia selama jam kantor. Hal ini terjadi karena sedikit demi sedikit dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat, petugas desa juga harus mengurus

kepentingan-kepentingan tertentu, seperti tanah agraris yang menjadi penghidupan kedewasaan masyarakat di Desa Turu Cinnae.

Peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja organisasi di Turu Cinnae masih memerlukan peningkatan secara nyata. Meskipun pembangunan desa secara nonfisik relatif baik, namun perkembangan struktur desa masih sangat buruk. Meskipun peran kepemimpinan dalam memotivasi bawahan sangat besar, namun bukannya tanpa hambatan seperti kurangnya keterampilan kepemimpinan, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, serta kurangnya teladan. Akibatnya kinerja tangan menjadi kurang optimal terutama dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu pekerjaan. Padahal, dengan anggaran desa yang tepat dan perencanaan yang baik maka pembangunan struktur desa dapat tercapai. Selama ada kerja sama, dukungan kolektif, dan kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, itu tidak masalah. Hal ini tentunya penting untuk kemajuan dan perkembangan desa di masa depan.

Namun, Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka desa tidak akan berkembang dengan pesat atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Untuk memastikan desa mandiri dapat tumbuh dan berkembang, beberapa syarat berikut perlu dipenuhi:

1. Mengembangkan teknik kepemimpinan yang transparan, artinya pemerintah desa (kepala desa) harus secara terbuka melakukan musyawarah mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga formal yang tersedia di desa.
2. Pemerintah desa, terutama kepala desa, perlu memahami perannya yang bersifat dualistik, yaitu sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat desa dan sebagai wakil pemerintah tingkat atas. Kepala desa harus memikul tanggung jawab atas kemajuan desanya dan menjalankan kepentingan pemerintah.
3. Untuk pengembangan otonomi desa, pemerintah desa harus lebih inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan ide-ide untuk memajukan desa.

Mengelola sumber daya alam dan manusia dengan kemampuan manajerial yang memadai untuk membentuk kekayaan Desa yang bersih dan teratur. Hal ini untuk memastikan bahwa desa dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai kegiatan pembangunan sehari-hari. Dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut dan kegiatan-kegiatan terpadu, lambat laun terwujud desa mandiri (Beratha, 1991). Pembangunan partisipatif merupakan upaya penguatan kemampuan masyarakat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur desa dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat, berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang Desa) :

“pemerintah desa kurang melakukan perhatian, hingga saat ini belum dilakukan pembenahan infrastruktur.” (Wawancara pada tanggal 09 Februari 2024).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. menyatakan bahwa pemerintahan desa, atau nama lain yang digunakan, didukung oleh petugas desa. mengatur bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan masyarakat, dan komisi kemasyarakatan. Kebijakan adalah serangkaian pendapat yang diambil oleh individu atau kelompok politik untuk menentukan keinginan dan cara mencapainya. Umumnya pihak yang membuat kebijakan mempunyai kekuasaan untuk menerapkannya

Saat ini kepemimpinan Kepala Desa Turu Cinnac belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari indikasi serupa dengan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan struktur jalan. Dengan kata lain, keringat yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai bagian dari kepemimpinannya belum sepenuhnya ditegaskan

#### b. Faktor- Faktor yang Menghambat Dan Mendukung Dalam Perbaikan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Turu Cinnac.

##### Faktor Penghambat

##### 1. Kurangnya Perhatian Dari Aparat Desa

Melihat sikap petugas di Desa Turu Cinnac, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dalam menyempurnakan pembangunan struktur desa, terdapat berbagai faktor penghambat yang dihadapi seperti pada (gambar 1) dibawah ini :

**Gambar 1.** Kondisi Jalan di Desa Turu Cinnac



Sumber : Hasil Observasi Peneliti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan desa mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembentukan komisi, partisipasi masyarakat,

dan penguatan daya saing. masyarakat adat dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. memperhatikan asas republik dan kesetaraan, keadilan, anugerah, dan keistimewaan hukum adat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Isransyah, 2014).

Seperti penyampaian masyarakat Desa Turu Cinnac mengungkapkan bahwa :

“Jika Anda ingin melakukan suatu pekerjaan atau memulai pembangunan di desa, sebaiknya adakan rapat terlebih dahulu. Hal ini penting agar kami, anggota BPD, mengetahui dengan jelas apa yang akan dikerjakan. Namun, sering kali tidak ada laporan atau rapat yang diadakan, dan semua hasil kerja tidak pernah dilaporkan kepada BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya telah mencoba mengajarkan cara membuat laporan kepada BPD, tetapi tidak ada perubahan. Pembangunan dilakukan tanpa laporan, dan jika ada pekerjaan yang akan dilakukan, seharusnya terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2024).

Blau dan Page menyatakan bahwa aparat dirancang melakukan fungsi administrasi secara efektif. Konsep ini berlaku terutama pada organisasi besar seperti pemerintahan, di mana segala sesuatu diatur secara formal. Sebaliknya, dalam organisasi kecil, hubungan informal sering kali sudah memadai untuk mengatur berbagai kegiatan (Rahman, 2007).

Pembangunan infrastruktur di Desa Turu Cinnac perlu mendapat perhatian serius dari birokrasi desa, karena saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan desa-desa lain. Sebagai contoh, Desa Barugae telah mengalami perkembangan pesat dalam infrastruktur karena dukungan aktif dari pemerintah desa serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung berbagai kegiatan dan segala pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Seperti yang di katakan oleh Darniati selaku anggota pemudi desa Turu Cinnac :

“Permasalahan yang mungkin terjadi adalah tidak adanya kerjasama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, yang mengakibatkan terhambatnya distribusi pembangunan bangunan seperti jalan raya. Sedikit demi sedikit, ketidakmampuan Pemerintah Desa Turu Cinnac dalam mengkoordinasikan desa yang dikelolanya juga menyebabkan desa tersebut tertinggal dibandingkan desa lain. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024).

Saat ini Desa Turu Cinnac tergolong Desa Turu Cinnac, yang terletak di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, merupakan salah satu desa tertinggal. Kurangnya pembangunan infrastruktur fisik mungkin merupakan salah satu faktor penyebab status desa tersebut sebagai desa tertinggal.

## 2. Kepemimpinan yang tidak efektif

Kepala desa memainkan peranan penting dan memegang posisi yang sangat signifikan dalam pemerintahan desa, karena dia bertanggung jawab untuk menegakkan pemerintahan di desa. Sebagai pemimpin, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. sedikit demi sedikit dalam menyelenggarakan selain tugas administratif Selain tugas terkait pembangunan, kepala desa juga bertanggung jawab untuk mengurus urusan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban, serta memperkuat dan mengembangkan semangat gotong royong di antara warga. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Turu Cinnae, yaitu:

“Kemungkinan masalah kesehatan bisa menjadi salah satu penghalang utama dalam pembangunan infrastruktur, selama masa jabatannya sebagai kepala desa di Desa Turu Cinnae, sering kali kondisi kesehatannya terganggu. Sehingga mengakibatkan hampir seluruh proyek pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan dan ini akan menghambat perkembangan desa ini. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024).

Selama masa jabatannya sebagai Kepala Desa Turu Cinnae, kesehatan Kepala Desa Turu Cinnae sering mengalami penurunan, yang menyebabkan dia sering absen dari kegiatan resmi seperti pembukaan acara atau memberi sambutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Kepala Desa sangatlah berat. Untuk menjalankan tugas dan meningkatkan pembangunan di desa, Kepala Desa memerlukan dukungan dari perangkat desa lainnya serta kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah dan aparat terkait. Peneliti berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan desa, masih membutuhkan perhatian lebih karena banyak keluhan dari masyarakat mengenai perbaikan jalan yang merupakan akses utama bagi warga desa.

## 3. Ketiadaan lahan untuk pembangunan jalan

Menurut pemerintah desa, keterbatasan lahan atau keengganan masyarakat untuk menyerahkan sebagian lahannya untuk dijadikan jalan desa menjadi kendala utama. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Turu Cinnae:

“Terutama dalam hal infrastruktur jalan tani, pemilik lahan persawahan biasanya enggan memberikan sebagian tanah mereka, meskipun imbalan yang ditawarkan sudah sesuai.” . (Wawancara pada tanggal 05 Februari 2024).

Masyarakat enggan memberikan tanah mereka untuk pembangunan jalan karena mereka merasa tidak ada kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah

desa. Selain itu, tanah tersebut merupakan sumber kehidupan utama mereka, sehingga mereka sangat enggan untuk menyerahkannya, meskipun hanya sebagian kecil.

Kemampuan kepala desa sebagai pelaksana dan pemimpin formal di desa sangat penting untuk keberhasilan pembangunan. Kepala desa yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk bekerja sama akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah proses pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan.

## Faktor Pendukung

Sebagai pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan dan mengelola masyarakat, kepala desa seharusnya memahami kondisi nyata penduduknya. Dengan memahami situasi masyarakat secara mendalam, kepala desa dapat membuat keputusan dan tindakan yang lebih akurat. Jika seorang pemimpin tidak mengetahui kondisi sebenarnya, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Masyarakat merupakan elemen utama yang harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, dan kebutuhan serta kemanfaatannya harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan. Memberikan keterbukaan Interaksi masyarakat merupakan salah satu metode untuk mencapai pembangunan yang efektif. Pembangunan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, agar pembangunan dapat berjalan lancar, masyarakat perlu berbagi dalam bentuk yang berwarna-warni, seperti menghadiri pertemuan di kantor desa atau kelurahan, memberikan ide dan gagasan, serta menyumbangkan tenaga. Seperti diketahui, masyarakat Desa Turu Cinnae sangat antusias dengan usaha dan pembangunan yang dilakukan. sesuai dengan perkataan saudari Indah bahwasanya :

“Masyarakat Desa Turu Cinnae sangat antusias dan mendukung dalam Pembangunan di desa. Biasanya, ketika ada pembangunan di desa, mereka akan secara aktif bergotong royong dan saling membantu dalam membangun infrastruktur baik dalam hal yang kecil maupun besar.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024).

Faktor pendukung lainnya adalah sektor pertanian. Di Desa Turu Cinnae, sekitar 90% penduduknya adalah petani. Jika pemerintah desa dapat memanfaatkan sektor pertanian dengan baik, masyarakat Desa Turu Cinnae berpotensi mengalami peningkatan yang signifikan.

Dengan demikian, jika perangkat desa menjalankan kewenangannya dengan baik, selanjutnya segala pembanguna desa bisa berjalan dengan sukses dan

memenuhi harapan. Maka dari itu, usaha yang digunakan harus melibatkan strategi yang memperlakukan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa: Menurut teori ukuran kinerja Lenvinne yang dikutip dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175), kinerja kepala Desa Turu Cinnae Masih belum optimalnya peningkatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan yang diterima warga mengenai kinerja kepala desa.

Seorang pemimpin harus menyadari tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya. Faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Turu Cinnae termasuk kurangnya perhatian dari aparat desa, sehingga pembangunan belum maksimal. Selain itu, masalah kesehatan kepala desa juga mempengaruhi kinerjanya; seringnya gangguan kesehatan menghambat kemampuannya dalam memimpin dan mengontrol desa. Faktor lainnya adalah Ketiadaan lahan untuk pembangunan jalan

Namun yang mendukung hal tersebut adalah antusiasme masyarakat Desa Turu Cinnae terhadap pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa dapat menggunakan energi masyarakat untuk pembangunan dan mengurangi anggaran desa yang dibutuhkan.

Rekomendasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa Turu Cinnae dalam meningkatkan kinerja Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Turu Cinnae yakni:

1. Perencanaan yang Komprehensif
  - **Studi Kelayakan:** Lakukan studi kelayakan yang mendalam untuk menilai kebutuhan dan manfaat dari proyek jalan. Ini termasuk analisis biaya-manfaat, dampak lingkungan, dan sosial.
  - **Master Plan:** Integrasikan rencana pembangunan jalan ke dalam master plan yang lebih luas untuk transportasi dan infrastruktur wilayah.
2. Pendanaan dan Anggaran
  - **Sumber Pendanaan:** Diversifikasi sumber pendanaan, termasuk anggaran pemerintah, investasi swasta, dan skema pembiayaan publik-swasta (PPP).
  - **Pengendalian Biaya:** Lakukan pengendalian biaya yang ketat untuk menghindari pembengkakan anggaran dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan keuangan.

3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
  - **Partisipasi Masyarakat:** Libatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk mendapatkan dukungan dan masukan yang konstruktif.
  - **Koordinasi Antar Lembaga:** Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan sinergi dan kelancaran proyek.
4. Pemeliharaan dan Operasi
  - **Rencana Pemeliharaan:** Buat rencana pemeliharaan jangka panjang untuk menjaga kondisi jalan tetap baik.
  - **Pemantauan dan Evaluasi:** Lakukan pemantauan rutin dan evaluasi kinerja jalan untuk memastikan bahwa jalan tersebut tetap memenuhi kebutuhan pengguna.
5. Dampak Sosial dan Lingkungan
  - **Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL):** Lakukan AMDAL untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek.
  - **Mitigasi Dampak Sosial:** Rencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, seperti relokasi penduduk atau kompensasi bagi yang terdampak.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.

Dalam penelitian ini, terdapat kekurangan yang muncul diantaranya Pada tahap pengumpulan data, hambatan yang penulis rasakan dalam melakukan penelitian adalah peneliti mengalami kesukaran untuk menemui informan karena informan tersebut sibuk dengan pekerjaannya sehingga penulis harus bolak-balik mencari informan di Desa Turu Cinnae dan juga melihat kesehatan dari kepala desa yang mengalami penurunan sehingga peneliti hanya bisa mendapatkan informasi dan data yang minim dalam penelitian ini.

Untuk peneliti selanjutnya terkait Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan pada desa lainnya perlu melihat faktor-faktor lain atau mengembangkan lebih banyak pendekatan tentang kinerja dan lain sebagainya, serta melibatkan banyak responden dalam melakukan penelitian yang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah terpelosok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajang, M. (2015). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. *Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*.
- ALAMSYAH, A., IP, S., SI, M., & ZAINAL, N. U. R. A. (n.d.). *Analisis Komposisi Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum 2013 Berbasis Integrasi Keilmuan Pada Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin*.
- Andrew, D. P. S., Pedersen, P. M., & McEvoy, C. D. (2019). *Research methods and design in sport management*. Human Kinetics.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42, 139–160.
- Beratha, I. N. (1991). *Pembangunan desa berwawasan lingkungan*. (No Title).
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Grodal, S., Anteby, M., & Holm, A. L. (2021). Achieving rigor in qualitative analysis: The role of active categorization in theory building. *Academy of Management Review*, 46(3), 591–612.
- Harfiani, R., Mavianti, M., & Tanjung, E. F. (2020). Practical Application Of Inclusive Education Programs In Raudhatul Athfal. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, 1(1), 333–339.
- Intan, S. (2013). Sorotan Terhadap Jender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan. *Cet, 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013)*.
- Isransyah, M. (2014). Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa kota bangun seberang kabupaten kutai kartanegara. *EJurnal Ilme Pemerintahan*, 2(1).
- Nasution, L. (2020). Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19. 'ADALAH. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15384>
- Rahman, A. (1998). *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya.
- Rahman, A. (2007). *Rahman HI Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: A step-by-step guide for business researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1609406919862424.
- Ratminto, A. S. W., & Septi, A. (2005). *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryadi, A. S. (2005). *Rumah Singgah Anak Jalanan di Yogyakarta Penekanan pada Hubungan antar Ruang Dalam Pengembangan Potensi Anak*.
- Torang, S. (2012). *Metode riset struktur dan perilaku organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Waani, I. M. (2014). Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1, 3.
- Wilbur, J., Kayastha, S., Mahon, T., Torondel, B., Hameed, S., Sigdel, A., Gyawali, A., & Kuper, H. (2021). Qualitative study exploring the barriers to menstrual hygiene management faced by adolescents and young people with a disability, and their carers in the Kavrepalanchok district, Nepal. *BMC Public Health*, 21, 1–15.